



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Jalan Syech Nawawi Albantani No. 3 Km. 5 Telp. (0254) 214085 Kota Serang - Banten

 www.ptun-serang.go.id  informasi@ptun-serang.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 167 /KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**


Nama : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 13 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**



**H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001**

**Pihak Pertama
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**



**Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nomor : 167 /KPTUN.W2-TUN3/RA.1.10/I/2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	91%
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
		3. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%

No.	Program	KRO/RO	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Rp9.526.604.000,-	Layanan Perkantoran	
		- Gaji dan Tunjangan	Rp 7.319.148.000,-
		- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2.126.456.000,-
		Layanan Sarana Internal	
		- Belanja Modal	Rp 80.000.000,-
		Layanan Umum	
		- Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	Rp 700.000,-
		- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 300.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp60.060.000,-	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
		- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	Rp 10.000.000,-
		- Pos Bantuan Hukum	Rp 33.000.000,-
		- Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 1.060.000,-
		- Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	Rp 16.000.000,-

Serang, 13 Januari 2025

Pihak Pertama

Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

NIP. 19760810 200012 1 001

Pihak Kedua,

Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 19580610 198503 1 001



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR: 118.a/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di Tahun 2025 untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-Undang Noor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 10.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Noor 19/SEK/SK/I/2018 Tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI;
- 11.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- 12.Dokumen Perjanjian Kinerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG.**
- KESATU** : Memberlakukan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEDUA** : Memerintahkan dan Menugaskan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mepedomani dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 14 Januari 2025



K E T U A,

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	91%
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
		3. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%

No.	Program	KRO/RO	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen Rp9.526.604.000,-	Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 7.319.148.000,- Rp 2.126.456.000,-
		Layanan Sarana Internal - Belanja Modal	Rp 80.000.000,-
		Layanan Umum - Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	Rp 700.000,-
		- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 300.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
		- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	Rp 10.000.000,-
		- Pos Bantuan Hukum	Rp 33.000.000,-
		- Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 1.060.000,-
		- Sudang Di Luar Gedung Pengadilan	Rp 16.000.000,-

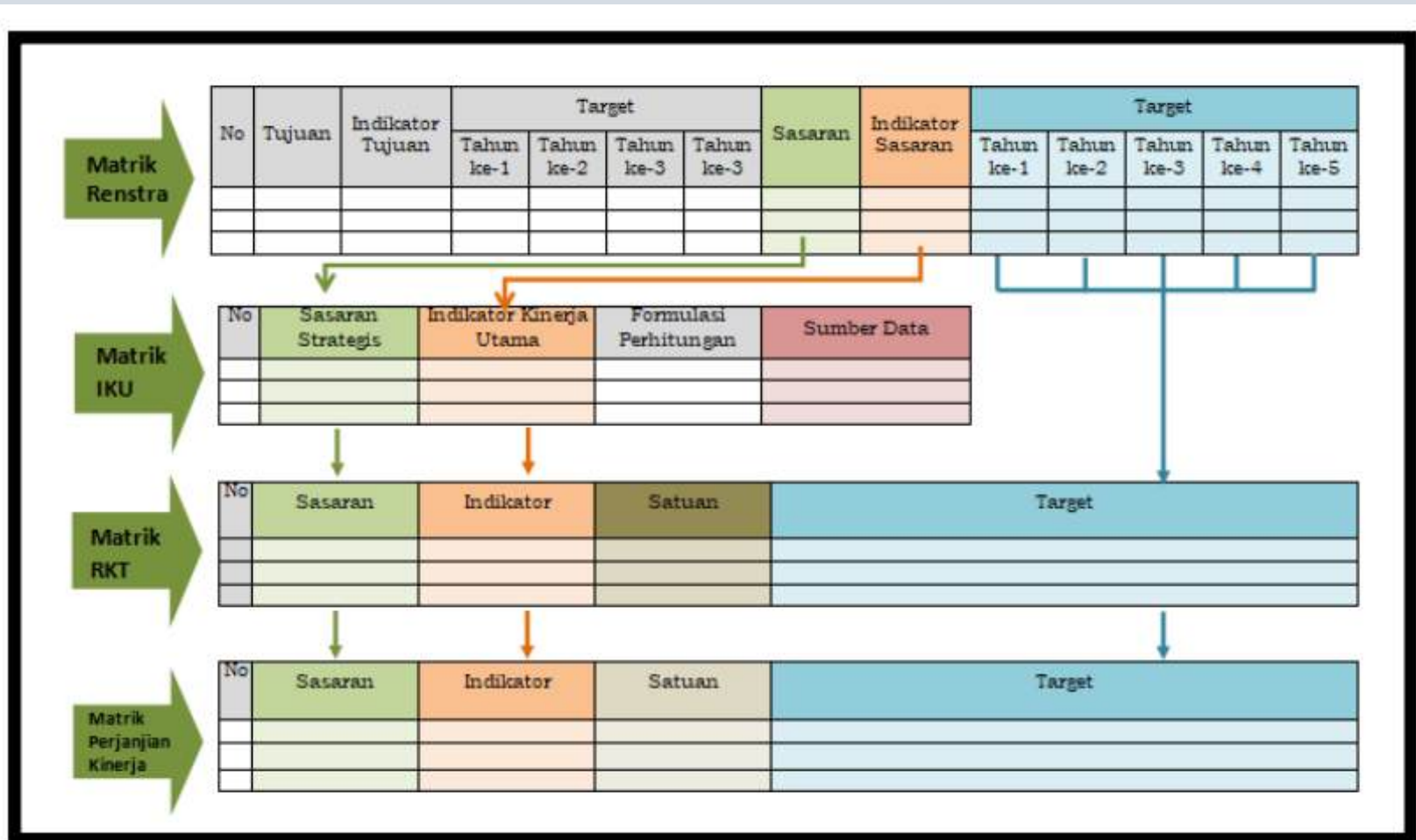


KETUA,

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.



HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DENGAN PERJANJIAN KINERJA





PTUN SERANG



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akutestasi Kompetensi Hormonal Layak Adaptif Inovasi



**KETUA PTUN SERANG LAKUKAN
PENANDATANGANAN PAKTA
INTEGRITAS DAN PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2025**



Pesan Teks WhatsApp
0896-1612-2011



Kunjungi Website
ptun-serang.go.id

